

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerimaan Desa dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Benlutu Kecamatan Batuputih Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Sumber Penerimaan Desa Benlutu dalam tiga tahun terakhir berasal dari Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain, dimana Pendapatan Transfer yaitu Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa digunakan untuk meningkatkan Sarana dan Prasarana Desa Benlutu.
2. Desa Benlutu tidak mempunyai PADes (Pendapatan Asli Desa), namun penerimaan transfer dan hibah dari pemerintah daerah sudah sangat besar tetapi pengelolaan penerimaan terhadap pembangunan sarana dan prasarana yang ada tidak tepat sasaran.
3. Pengelolaan Penerimaan Desa dalam meningkatkan pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Benlutu Kecamatan Batuputih, di mana dalam proses Pengelolaan Penerimaan ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Penerimaan masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan

kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Benlutu kepada masyarakat Desa Benlutu.

4. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, di mana penggunaan anggaran Penerimaan dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Penerimaan yang dilakukan di Desa Benlutu masih kurang efektif.
5. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Penerimaan dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Benlutu masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah Desa Benlutu serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Benlutu. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Penerimaan tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Penerimaan yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.
6. Pemerintah Desa Benlutu hanya sekedar membangun/melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana di desa namun fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun tidak layak pakai dan tidak pernah digunakan masyarakat..

1.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pemerintah Desa Benlutu Kecamatan Batuputih Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam proses Pengelolaan Penerimaan yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musrembang, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Benlutu kepada masyarakat Desa Benlutu. Kemudian pada tahap pelaksanaan perlunya aparat Pemerintah Desa Benlutu melakukan transparansi penggunaan anggaran Penerimaan, agar seluruh komponen masyarakat mengetahui pengalokasian Penerimaan sesuai yang diharapkan. Selanjutnya proses pertanggungjawaban harus dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Benlutu sendiri dan perlunya evaluasi masyarakat dalam setiap proses pengelolaan Penerimaan.
2. Sebagai Pemerintah Desa Benlutu Kecamatan Batuputih Kabupaten Timor Tengah Selatan perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap tim pengelola Penerimaan. Kemudian perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengelolaan Penerimaan sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dapat mencapai tujuan dari Penerimaan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakrullah, Zudan, dkk. 2004. *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*. Jakarta. CV Ciprui.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, IAI-KASP. 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*.
- Indrantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta. Penerbit BPFE.
- Juliantra, Dadang. 2003. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.
- Kartasasmita, Ginandjar. 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta. Pustaka cidesindo
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta.
- Nordiawan, Dedi. 2012 Ed, II. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*.
- Rondinelli, Dennis A. 1983. *Kemitraan Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Universitas Brawijaya.
- Suparno, A.Suhaenah. 2001. *Pembangunan Desa*. Jakarta. Erlangga.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta. Salemba Empat.
- Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintah Desa /Marga*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Yustika, Erani, Ahmad. 2016. *Membangun Sarana dan Prasarana Desa*. Jakarta. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

